

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Agus Kasiyanto, 2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia.
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KPK.
- L.J.van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Lexy Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-10, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- M Yahya Harap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

- M. Jusly Penus Sagala, 2019, Perbuatan dianggap korupsi beserta penjelasannya, Yogyakarta, Deepublish
- Mahrus Ali, 2016, Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Pers
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Bandung, Mandar Maju
- Miftah Thoha, 2014, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Yogyakarta, Kencana
- Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Jakarta, Bina Aksara
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Semarang, Badan Penerbit UNDIP
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Media Group
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka
- Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional, Bandung, Mandar Maju
- Sahya Anggara, Administrasi Keuangan Negara, Bandung, Pustaka Setia
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Djembatan
- Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, 2006, Diktat Hukum Kepegawaian, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

W.J.S. Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka.

Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Ghalia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.

C. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Edward O.S Hiariej, 2012, Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas

Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada

Firman Wijaya, 2006, Rekonstruksi Keadilan dalam Pengungkapan dan Penuntasan Tindak Pidana Korupsi melalui Whistleblower dan Justice Collaborator, Disertasi Doktoral Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta mengutip Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Fransiska Novita Eleanora, 2012, Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2

Indra Gunawan Purba, 2020, Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Kaidah, Vol .19 No.2

Made Aditya Pramana Putra, 2016, Perlindungan Hukum Tenaga Honorar Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Bali, Jurnal Magister Hukum Udayana

Nur Iman, 2019, Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorar Kategori Ii Di Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Semarang, Jurnal Unnes

- Rahardjo, M. Dawam, 1998, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kajian Konseptual dan sosial-kultur*, Jakarta, Makalah Seminar Berajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., dan Ainun Habibah, 2013, *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12. Nomor 2
- Tamala Sari Martha Prakoso , *Recidive*, 2014, *Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi dalam Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/PID.B/2009/PN.KRAY Jo. Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG JO. Nomor:167K/ PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Vol.3 No.1
- Wasisto Raharjo Jati, *Analisa, Kedudukan dan Pekerjaan PTT Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*, Jurnal Borneo, 2015, Vol. 11, No.1